

Persepsi Mahasiswa terhadap Keadilan dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran Lalu Lintas

¹Ferino Keiza Nainggolan, ²Gilbert Cristofel Simanjuntak, ³Jovan Stevan Pane,

⁴Jecky Simarmata, ⁵Poniman

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

jeckysimarmata123@email.com

ABSTRAK

Penegakan hukum lalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Namun, persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam penerapannya masih menjadi persoalan karena adanya perbedaan pengalaman dan penilaian terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas di Sidorejo Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa Universitas Negeri Medan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan penegakan hukum lalu lintas dipengaruhi oleh transparansi proses, konsistensi penindakan, pengalaman pribadi, faktor sosial, serta penggunaan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Sebagian mahasiswa menilai penegakan hukum lebih adil ketika dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti, khususnya melalui sistem *ETLE*. Namun, sebagian lainnya masih menilai terdapat ketidakadilan akibat inkonsistensi penindakan dan perbedaan perlakuan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan prosedural menjadi faktor dominan dalam membentuk persepsi mahasiswa, sehingga peningkatan transparansi, konsistensi, dan integritas aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum lalu lintas.

Kata Kunci: ETLE; Keadilan Hukum; Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; Persepsi Mahasiswa

PENDAHULUAN

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dalam konteks masyarakat modern, hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik dari risiko kecelakaan serta kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam penerapannya (Wahono dkk., 2025). Persepsi ini menjadi krusial karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat menilai penegakan hukum tidak adil, maka legitimasi hukum dapat menurun dan berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran (Chenane dkk., 2020).

Dalam realitas sosial, fenomena pelanggaran lalu lintas masih menjadi permasalahan yang kompleks di berbagai daerah, termasuk di Sidorejo Hilir. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, hingga praktik pelanggaran administratif lainnya masih sering ditemukan. Di sisi lain, penegakan hukum yang dilakukan aparat seringkali menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, mulai dari anggapan adanya ketidakadilan hingga dugaan praktik diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas sistem hukum secara keseluruhan (Saptomo, 2022).

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk opini publik serta memberikan penilaian kritis terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk dalam hal penegakan hukum. Sebagai individu yang umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan akses informasi yang luas, mahasiswa cenderung memiliki perspektif yang lebih reflektif terhadap isu keadilan (Finkeldey dkk., 2025). Persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum lalu lintas menjadi menarik untuk dikaji karena dapat merepresentasikan pandangan generasi muda terhadap legitimasi hukum. Selain itu, mahasiswa juga sering menjadi bagian dari pengguna jalan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem penegakan hukum, sehingga pengalaman mereka dapat memberikan gambaran empiris yang relevan (Ridlo dkk., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian mengenai keadilan prosedural menegaskan bahwa individu lebih cenderung mematuhi hukum ketika mereka merasa diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Selain itu, studi lain juga mengungkapkan bahwa transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi positif masyarakat (Alda dkk., 2020). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada masyarakat umum dan belum secara spesifik mengkaji persepsi mahasiswa sebagai kelompok sosial tertentu. Di samping itu, pendekatan yang digunakan cenderung kuantitatif, sehingga kurang menggali pengalaman subjektif individu secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait dengan bagaimana mahasiswa memaknai keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggali perspektif informan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai persepsi keadilan hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di tingkat lokal (Supriyono, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas di Sidorejo Hilir. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Persepsi merupakan proses psikologis yang melibatkan penafsiran individu terhadap stimulus yang diterima melalui indera, yang kemudian diolah menjadi makna tertentu dalam konteks sosial. Dalam perspektif psikologi sosial, persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan objektif, tetapi juga oleh pengalaman, nilai, serta kondisi sosial individu yang membentuk interpretasi subjektif terhadap realitas. Persepsi berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap suatu fenomena, termasuk dalam menilai keadilan suatu sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tidak bersifat netral, melainkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial dan pengalaman empiris yang mereka miliki. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap interaksi dengan aparat sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung maupun informasi yang diperoleh dari lingkungan sosialnya (Bates dkk., 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman pribadi, tingkat pendidikan, nilai, serta sikap individu, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, budaya, serta interaksi dengan institusi tertentu seperti aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, pengalaman langsung seperti terkena tilang atau menyaksikan proses penegakan hukum akan sangat mempengaruhi bagaimana individu menilai keadilan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti sistem tilang elektronik juga dapat mempengaruhi persepsi karena dianggap lebih objektif dan transparan. Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap keadilan hukum lalu lintas merupakan

hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis dan konteks sosial yang melingkupinya (Indri, 2025).

Keadilan dalam Penegakan Hukum

Keadilan dalam penegakan hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar legitimasi suatu sistem hukum. Secara teoritis, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana hasil atau sanksi didistribusikan secara adil kepada setiap individu, sedangkan keadilan prosedural berfokus pada proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, keadilan prosedural menjadi sangat penting karena masyarakat cenderung menilai keadilan berdasarkan bagaimana mereka diperlakukan oleh aparat, bukan hanya pada hasil akhir yang diterima. Ketika proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam proses dapat menurunkan legitimasi hukum di mata publik (Hasan dkk., 2024).

Selain itu, prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan landasan penting dalam sistem hukum modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks penegakan hukum di lapangan yang rentan terhadap subjektivitas. Oleh karena itu, inovasi seperti sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dikembangkan untuk meminimalisasi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Implementasi teknologi ini dinilai mampu meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas, karena berbasis pada bukti digital yang dapat diverifikasi (Aji, 2026).

Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perilaku pengguna jalan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban pengendara hingga mekanisme penindakan pelanggaran. Dalam perkembangannya, sistem penegakan hukum lalu lintas mengalami transformasi dengan adanya penerapan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini memungkinkan penindakan pelanggaran dilakukan secara otomatis melalui perangkat elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ETLE juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat (Rauf dkk., 2025).

Peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum tetap menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi regulasi lalu lintas. Aparat tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Profesionalisme, integritas, dan konsistensi aparat sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum. Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan oleh aparat dapat bersifat represif maupun persuasif, tergantung pada situasi dan jenis pelanggaran. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan keadilan dan transparansi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat hukuman (Soegriwo dkk., 2025).

Persepsi Masyarakat terhadap Hukum

Persepsi masyarakat terhadap hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Teori legitimasi hukum menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi hukum ketika mereka percaya bahwa hukum tersebut adil dan ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks lalu lintas, persepsi keadilan menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku pengguna jalan. Ketika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, maka mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap aparat atau sistem hukum dapat mendorong perilaku pelanggaran sebagai bentuk resistensi terhadap otoritas (Aji, 2026).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan prosedural memiliki pengaruh signifikan terhadap legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat. Interaksi yang adil, penghormatan terhadap individu, serta transparansi dalam proses penegakan hukum merupakan faktor yang memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, penggunaan teknologi seperti ETLT juga dapat meningkatkan persepsi keadilan karena mengurangi subjektivitas dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari (Adhinugroho dkk., 2024)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna subjektif, pengalaman, serta interpretasi individu terhadap fenomena sosial yang kompleks. Dalam penelitian kualitatif, realitas dipahami sebagai sesuatu yang bersifat konstruktif dan kontekstual, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap persepsi mahasiswa sebagai subjek penelitian (Miles dkk., 2020).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa UNIMED merupakan kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis serta pengalaman sosial yang relevan dengan fenomena penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, mahasiswa sebagai pengguna jalan aktif memiliki peluang besar untuk berinteraksi langsung dengan praktik penegakan hukum, sehingga mampu memberikan data empiris yang mendalam dan reflektif terkait persepsi keadilan.

Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan yang pernah mengalami atau menyaksikan penegakan hukum lalu lintas. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi mahasiswa yang memiliki pengalaman terkait pelanggaran atau penegakan hukum lalu lintas serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah, melainkan pada kedalaman dan relevansi informasi yang diberikan (Imran & Almusharraf, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan terhadap keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas. Pedoman wawancara disusun secara fleksibel agar memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan jawaban informan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa catatan lapangan dan rekaman wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh. Penggunaan wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif dinilai efektif untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam (Imran & Almusharraf, 2023).

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam merancang pertanyaan, melakukan wawancara, serta menganalisis data. Selain itu, digunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung yang berisi daftar pertanyaan terbuka terkait persepsi mahasiswa terhadap keadilan penegakan hukum lalu lintas. Instrumen ini bersifat fleksibel dan dapat

berkembang sesuai dengan dinamika di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam kategori atau tema tertentu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Proses analisis ini bersifat siklus dan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian (Miles dkk., 2020).

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi data. Sementara itu, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan. Kedua teknik ini merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Imran & Almusharraf, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Penelitian ini melibatkan enam mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka terkait penegakan hukum lalu lintas. Informan berasal dari berbagai fakultas dengan rentang usia 18–23 tahun, sehingga memberikan variasi perspektif yang cukup beragam. Seluruh informan memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti pernah ditilang, terkena sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), atau menyaksikan proses penegakan hukum di lapangan. Keberagaman pengalaman ini menjadi dasar penting dalam membentuk persepsi terhadap keadilan hukum, karena persepsi sangat dipengaruhi oleh pengalaman empiris individu.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Fakultas	Pengalaman dengan Penegakan Hukum
1	I1	L	FIS	Pernah ditilang langsung
2	I2	P	FE	Pernah terkena ETLE
3	I3	L	FT	Pernah menyaksikan penilangan
4	I4	P	FIP	Pernah ditilang langsung
5	I5	L	FBS	Pernah terkena ETLE
6	I6	P	FMIPA	Pernah menyaksikan penilangan

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh informan memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai data yang relevan dan kaya secara empiris.

Temuan Penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas terbagi dalam beberapa pola utama, yaitu persepsi keadilan yang bersifat prosedural, persepsi ketidakadilan akibat inkonsistensi, serta persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Mayoritas informan menyatakan bahwa penegakan hukum akan dianggap adil apabila dilakukan secara transparan dan konsisten. Sebaliknya, ketidakadilan muncul ketika terdapat perbedaan perlakuan antar pelanggar atau ketika proses penindakan tidak jelas.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik

Tema Utama	Subtema	Deskripsi Temuan	Kutipan Representatif
Transparansi	Kejelasan proses	Proses penegakan hukum dianggap adil jika terbuka dan berbasis bukti	“Kalau pakai ETLE lebih jelas karena ada bukti kamera” (I2)
Konsistensi	Keseragaman penindakan	Terdapat perbedaan perlakuan antar pelanggar	“Kadang ada yang ditilang, kadang tidak” (I3)
Pengalaman Pribadi	Interaksi langsung	Pengalaman negatif mempengaruhi persepsi	“Saya merasa diperlakukan tidak adil” (I1)
Teknologi (ETLE)	Objektivitas	ETLE meningkatkan persepsi keadilan	“Tidak bisa negosiasi, jadi lebih adil” (I5)
Faktor Sosial	Status sosial	Persepsi adanya diskriminasi	“Ada yang bisa lolos, ada yang tidak” (I4)

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara sistem, aparat, dan pengalaman individu.

Klasifikasi Persepsi Mahasiswa

Untuk memperjelas distribusi persepsi, dilakukan kategorisasi berdasarkan kecenderungan jawaban informan.

Tabel 3. Klasifikasi Persepsi

Kategori Persepsi	Jumlah Informan	Indikator
Adil	2	Transparansi tinggi, ETLE
Tidak sepenuhnya adil	3	Inkonsistensi penindakan
Tidak adil	1	Pengalaman negatif

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berada pada posisi “tidak sepenuhnya adil”, yang mengindikasikan adanya ambivalensi dalam menilai sistem hukum.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan penegakan hukum lalu lintas sangat dipengaruhi oleh keadilan prosedural, yaitu bagaimana proses hukum dijalankan. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa individu lebih menilai keadilan berdasarkan proses dibandingkan hasil akhir (Hasan dkk., 2024). Transparansi dan konsistensi menjadi indikator utama dalam membentuk persepsi positif terhadap hukum. Ketika proses dianggap jelas dan tidak diskriminatif, maka mahasiswa cenderung menilai penegakan hukum sebagai adil.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti ETLE berperan dalam meningkatkan persepsi keadilan. Sistem ini dinilai lebih objektif karena berbasis bukti digital dan mengurangi interaksi langsung dengan aparat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan (Aji, 2026; Rauf dkk., 2025). Dengan demikian, teknologi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Namun demikian, persepsi ketidakadilan masih muncul akibat inkonsistensi dalam penindakan serta pengalaman negatif individu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah mengalami modernisasi, faktor manusia dalam penegakan hukum masih memiliki pengaruh signifikan. Temuan ini mendukung penelitian Indri (2025) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan interaksi dengan aparat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan dengan inovasi teknologi.

Selain itu, adanya persepsi bahwa faktor sosial dapat mempengaruhi penegakan hukum menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan

secara setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan berintegritas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas di Sidorejo Hilir dipengaruhi oleh transparansi proses, konsistensi penindakan, pengalaman pribadi, penggunaan teknologi, dan faktor sosial. Mahasiswa cenderung menilai penegakan hukum sebagai adil apabila proses penindakan dilakukan secara terbuka, berbasis bukti, dan berlaku sama bagi setiap pelanggar. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dinilai mampu meningkatkan objektivitas karena mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dan aparat, sehingga potensi negosiasi atau perlakuan diskriminatif dapat diminimalkan. Namun, sebagian mahasiswa masih menilai penegakan hukum belum sepenuhnya adil karena adanya inkonsistensi penindakan dan pengalaman negatif dalam interaksi langsung dengan aparat. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* dan keadilan prosedural perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang persepsi keadilan hukum serta memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

REFERENSI

- Adhinugroho, W., Ismiyanto, I., & ... (2024). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Innovative: Journal Of ...*, 4, 808–816. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13005>
- Aji, I. B. (2026). *Analisis Normatif Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia*. (3), 1–13.
- Alda, E., Bennett, R., Marion, N., Morabito, M., & Baxter, S. (2020). Antecedents of Perceived Fairness in Criminal Courts: A Comparative Analysis. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 44(3), 201–219. <https://doi.org/10.1080/01924036.2019.1615521>
- Bates, L., Hassan, E. H. A., Soderlind, D., & McLean, R. (2022). Does procedural justice predict intentions to speed? Evidence from a sample of young drivers. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 16, 100709. <https://doi.org/10.1016/J.TRIP.2022.100709>
- Chenane, J. L., Wright, E. M., & Gibson, C. L. (2020). Traffic stops, race, and perceptions of fairness. *Policing and Society*, 30(6), 720–737. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1587436>
- Finkeldey, J. G., Dennison, C. R., Reyes, N. T., DiRusso, A., & Brown, M. (2025). Contact with and Perceptions of Campus Police Among College Students at a Small-Town University. *Criminal Justice Review*, 50(3), 289–310. <https://doi.org/10.1177/07340168241240450;CTYPE:STRING:JOURNAL>
- Hasan, R., Watson, B., Haworth, N., Oviedo-Trespalacios, O., & Bates, L. (2024). How do perceptions of procedural justice, police legitimacy, and legitimacy of laws influence intentions to drug drive? *Journal of Safety Research*, 90(February), 86–99. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2024.06.006>
- Imran, M., & Almusharraf, N. (2023). *Qualitative Research Methods*, by Monique Hennink, Inge Hutter, and Ajay Bailey, 2020, pp. 376, £ 36.99 (paperpack), ISBN: 9781473903913, London: SAGE Publications. *Quality & Quantity*, 57. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01660-5>
- Indri. (2025). *Program magister (s2) ilmu hukum universitas islam sultan agung semarang 2025*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rauf, M. V., Thalib, T., & Kadir, J. (2025). Efektivitas Kebijakan E-Tilang di Dirlantas Polda Gorontalo. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 11719–11727. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1548>
- Ridlo, N., Zahra, A., & Brilianti, D. F. (2025). Traffic Regulation Knowledge and Driving Safety Awareness in Students. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*,

-
- 4(1), 378–394. <https://doi.org/10.58526/JSRET.V4I1.688>
- Saptomo, P. (2022). *Perilaku Pengendara Roda Dua Di Traffic Light*. 6(2), 139–162. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/50439>
- Soegriwo, M., Muhjad, M. H., & Hayati, M. (2025). Keadilan Restoratif dan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Era Tilang Elektronik: Studi pada Polda Kalimantan Selatan. *Lex Mandiri*, 1(02), 94–105. <https://doi.org/10.65369/yxk4f440>
- Supriyono, S. (2024). *RESEARCH METHODOLOGY: QUALITATIVE APPROACH*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26723.57121>
- Wahono, T. C., Isnaini, I., & Frensh, W. (2025). Effectiveness of Traffic Law Enforcement and Alternative Models for Solving It at the Central Tapanuli Police. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(2), 317–325. <https://doi.org/10.55885/JPRSP.V5I2.536>